

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR BIAYA PENDAFTARAN
TANAH OLEH WALI NAGARI DALAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI NAGARI KOTO BARU**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



SOLOK

2022

No. Register : 472/FHUK-UMMY/VIII-2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR BIAYA
PENDAFTARAN TANAH OLEH WALI NAGARI DALAM PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI NAGARI KOTO
BARU**

(Nama : Ovilla Dechia, NPM : 181000474201032, Fakultas Hukum, Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin, Pembimbing I :Rifqi Devi Lawra, SH, MH, Pembimbing II :Yulfa
Mulyeni, SH, MH, 2022) 62 halaman.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena telah terjadinya pungutan liar biaya pendaftaran tanah oleh Wali Nagari dalam Program Pendaftaran Tanah SistematisLengkap (PTSL). Program PTSL ini merupakan program yang diadakan oleh pemerintah, bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional yang mengharapkan semua tanah milik masyarakat dapat didaftarkan sehingga memiliki alat bukti yang kuat atas tanah tersebut berupa sertifikat hak milik, mempermudah masyarakat dalam pengurusan dan meringankan dalam segi pembiayaannya. Namun pelaksanaannya dilapangan di dapati adanya pungutan liar di luar dari ketentuan perundang-undangan yang dilakukan oleh Wali Nagari. Pungutan liar sendiri dilarang dalam Pasal 423 KUHP yang mengatur tentang kejahatan jabatan, serta pungutan liar juga melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh Wali Nagari dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Nagari Koto Baru. Serta mengetahui faktor penyebab pungutan liar yang dilakukan oleh Wali Nagari dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Nagari Koto Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau penelitian hukum yuridis sosiologis, dimana penelitian ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum. Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, wawancara dimana penulis melakukan wawancara dengan pegawai BPN pihak Kepolisian, dan masyarakat. Selain itu penulis juga mengumpulkan data melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Untuk proses penegakan hukum untuk pungutan liar di kantor Wali Nagari dalam program PTSL ini beberapa tokoh masyarakat yang peduli dengan terjadinya pungutan liar telah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk dapat diproses secara hukum, namun sampai saat sekarang ini belum ditindak lanjuti arena harus dilakukannya operasi tangkap tangan oleh pihak kepolisian untuk perbuatan pungutan liar yang telah dilakukan oleh Wali Nagari, Namun karena belum ditindak lanjuti maka masyarakat melakukan koordinasi melalui musyawarah dengan wali nagari untuk meminta ganti rugi namun sampai saat sekarang ini masyarakat belum menerima atas kerugian yang telah dialami selain itu banyak faktor penyebab pungutan liar pada program ini yaitu, faktor yang berasal dari penyelenggara program PTSL, faktor yang berasal yang berasal dari masyarakat, dan juga faktor dari penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrian Sutedi. 2016. *Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, "Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agrarian, Isi Dan Pelaksanaannya"* Jilid 1 Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Djambatan.

Evi Hartati. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

John Kenedi. 2007. *"Kebijakan Hukum Pidana"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supriadi. 2009. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.

Urip Santoso. 2012. *Hukum Agraria*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Zainudidin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Surat Keputusan Bersama Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

C. Jurnal

Celine Dalia, 2020 "*Penerapan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*". Studi Di Desa Lombang Dajah Kabupaten Bangkala, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm 687.

Dian Aries Mujiburohman. *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jurnal Bhumi. Vol. 4 No.1, hlm 88.

Dwi Joko Hariyanto, 2020 “*Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pungutan Liar Terhadap Mobil Angkutan Barang Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, hlm.5

Erna Puspita sari 2018 “*penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar dengan modus uang administrasi di kantor kecamatan rumbai berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi*”. Jurnal JOM fakultas hukum. Volume V no I , april, hlm. 6

Isdiyana Kusuma Ayu,2019 “*Problemтика Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu*”, jurnal ilmiah hukum. Volume 27, Nomor 1, Maret 2019-Agustus hlm. 28

Niken Wahyuning Retno Mumpuni, “*Satgas Saber Pungli Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Prodi Hukum Fakultas Ekonomi Dan Sosial Universitas Jendral Achmad Yani Yogyakarta, hlm. 109

Suyikati, “*Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 tahun 2018 di BPN Yogyakarta* “ Jurnal ilmiah hukum. hlm.110

Wahyu ramadhani, 2017 “*Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*” Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volime 12. Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm. 271

D. Skripsi

Adella Maria Rindler, 2020. “*Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Sumba Barat*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hlm 8.

Dila Qoriah, 2020 “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara Di Desa Rantau Puri Kabupaten Batang Hari*”, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020, hlm. 2

E. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Wali_nagari. Diakses pada tanggal 5 Juni 2022 pukul 19.20 WIB.

Pungutan Liar Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Moh. Toha Solahuddin. https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sulsel/files/paraikatte/26_paraikatte_edisi_26_1_web.pdf . Diakses pada tanggal 4 April 2022 pukul 11.14 WIB.

